

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan *direct action*nya, dan sebagainya.¹ Pada negara-negara demokrasi umumnya dianggap tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan². Dalam Pemilu, tingkat partisipasi pemilih adalah salah satu indikator penting tentang bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan negara mereka.

Partisipasi politik dalam pemilu merupakan isu yang relevan. Menurut International IDEA, tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi dalam banyak kasus merupakan tanda vitalitas demokrasi, sementara jumlah pemilih yang lebih rendah biasanya dikaitkan dengan sikap apatis dan ketidakpercayaan pemilih terhadap proses politik. Terdapatnya tren partisipasi yang menurun secara global

¹ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 367.

²*Ibid*. Hlm 369.

sejak 1999 telah menimbulkan banyak kekhawatiran di antara para pemangku kepentingan pemilu. Oleh sebab itu International IDEA sejak didirikan pada tahun 1995 punya perhatian terlibat dalam penelitian tentang partisipasi pemilih³. Atas dasar itu penelitian ini menemukan relevansinya.

Pada negara demokrasi setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih yang artinya seluruh warga negara tanpa melihat etnis, suku, ras, dan agama berhak untuk berpartisipasi dalam politik. Penelitian ini bermaksud menjelaskan partisipasi politik etnis Tionghoa yang merupakan masyarakat minoritas di Indonesia dalam system politik yang sudah berubah, dari semula system politik otoriter masa Orde Baru menjadi system politik demokrasi masa Reformasi. Berdasar data BPS (2011) jumlah etnis Tionghoa di Indonesia sebesar 1,2 persen dari total penduduk⁴.

Pemerintah Indonesia, semasa Orde Baru punya perlakuan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Pemerintahan Suharto (1966-1998) memandang ketionghoaan tidak cocok dengan kepribadian bangsa dan bermasalah bagi persatuan dan kesatuan nasional. Sejumlah tindakan keras dipaksakan untuk mengasimilasikan etnis Tionghoa ke dalam penduduk Indonesia yang lebih luas, agar ketionghoaan dan eksklusivitas mereka hilang. Misalnya dibawah pemerintahan Suharto orang Tionghoa tidak diizinkan membentuk partai politik mereka sendiri, dan tidak ada orang Tionghoa yang diangkat menjadi pejabat tinggi Negara, karena kesetiaan mereka kepada Indonesia dipertanyakan.⁵

³ Abdurashid Solijonov. 2016. *Voter Turnout Trends around the World*. Strömsborg: International IDEA

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/28/283-persen-penduduk-indonesia-adalah-etnis-cina>. Diakses 12/11/2019

⁵ Chang-Yau Hoon. 2012. *Identitas Tionghoa Pasca Soeharto: Budaya, Politik dan Media*. Jakarta: Yayasan Nabil. Hlm 46.

Di Indonesia etnis Tionghoa disebut sebagai kelompok minoritas karena memang jumlah mereka yang lebih sedikit dari jumlah orang-orang pribumi (mayoritas) atau penduduk asli Indonesia. Dengan adanya kelompok minoritas dan mayoritas ini, etnis Tionghoa mengalami diskriminasi dan diperlakukan tidak adil. Suara mereka kurang di dengar dan keberadaan mereka kurang diperhatikan. Dampaknya, mereka cenderung tertutup dan pasif dalam politik.

Pada masa Soeharto, sebutan untuk kelompok etnis Tionghoa adalah orang Cina. Lalu, ketika pemerintahan beralih ke Presiden Habibie, diubah sebutannya menjadi orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa. Pada masa Habibie partai-partai politik dibiarkan tumbuh, lahir sekitar 100 partai politik dan di antaranya lahir 3 partai politik yang didominasi oleh etnis Tionghoa, yaitu: Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI).⁶

Kemudian peralihan pemerintahan ke Presiden Abdurachman Wachid, ada kebebasan menggunakan istilah Tionghoa atau Cina, dan, dengan pendekatan pluralismenya, Presiden Abdurachman Wachid berkeinginan menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap golongan etnis Tionghoa.⁷ Sejak masa Presiden Abdurachman Wachid berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2000 secara formal etnis Tionghoa di Indonesia memiliki kebebasan dalam mempraktekkan budaya Tionghoa dan berperan serta dalam politik nasional.⁸

⁶ Leo Suryadinata. 2003. Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?. *Antropologi Indonesia* 71. Hlm. 1-12

⁷ Melly G Tan. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 196-197.

⁸ Raden Maisa Yudono, Nurmasari Situmeang, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti. 2018. Peran Serta Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Pasca Refomasi. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan* 2018. Website: <https://pdfs.semanticscholar.org/c76f/b859ffd4d24259ab5830e901a7f7cf79f173.pdf>

Sebelum hak politik etnis Tionghoa secara formal dibuka, etnis Tionghoa tetap berpartisipasi tetapi secara tertutup, dalam melaksanakan aktivitas politiknya mereka mencari cara atau strategi yang paling aman untuk terlibat di dalam proses politik. Salah satunya dengan tidak berafiliasi secara terbuka dengan salah satu organisasi partai politik. Aktivitas yang muncul dipermukaan hanya dengan mengikuti proses pemilihan atau pencoblosan adalah salah satu cara aman buat mereka untuk berpartisipasi. Berdasarkan cirinya, Huntington dan Nelson menggolongkan partisipasi politik etnis Tionghoa bisa dikategori sebagai partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak luar⁹. Partisipasi politik etnis Tionghoa bukan karena kesadaran politik untuk pemenuhan haknya bersuara, melainkan untuk “aman” yang terbatas pada aktivitas pemungutan suara yang kala itu memilih “diwajibkan” oleh rejim otoriter yang berkuasa.

Menurut Suryadinata, untuk masa pasca-Soeharto, meski orang Tionghoa Indonesia sudah bebas mempertahankan identitas etnis mereka, akan tetapi proses ‘pembangunan bangsa Indonesia’ masih terus berproses. Ditataran formal, kebijakan negara terhadap orang-orang Tionghoa telah mengalami perubahan, akan tetapi masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat penduduk asli, tidak banyak berubah. Di dalam praktiknya, konsep penduduk asli *vis-à-vis* etnik Tionghoa tetap ada¹⁰.

Berdasar pada argumen Suryadinata, penelitian ini bermaksud menjelaskan partisipasi etnis Tionghoa dalam Pemilu 2019, studi kasusnya di Kelurahan Kranggan Kota Semarang yang di dalamnya ada Kawasan Pecinan. Penduduk Kelurahan Kranggan didominasi oleh etnis Tionghoa, data Monografi Kelurahan

⁹ Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta Hlm.166

¹⁰ Suryadinata. *Op.Cit*.

Kranggan (Agustus 2019) tercatat jumlah penduduk etnis Tionghoa sebesar 4.444 jiwa.

Tabel 1.1

**Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa
Kelurahan Kranggan pada Pemilu 2019**

TPS	DPT	Jumlah yang Hadir	Jumlah yang Tidak Hadir	Presentase Kehadiran
1	273	235	38	86,08%
2	283	220	63	77,74%
3	291	261	30	89,69%
4	296	259	37	87,50%
5	232	188	44	81,03%
6	222	187	35	84,23%
7	229	188	41	82,10%
8	295	245	50	83,05%
9	272	198	74	72,79%
10	217	172	45	79,26%
11	278	203	75	73,02%
12	270	227	43	84,07%
Jumlah	3.158	2.583	575	81,79%

Sumber: Data dari Kelurahan Kranggan 2019

Rata-rata partisipasi politik pemilih Kota Semarang pada Pemilu 2019 sebesar 82,5 persen. Dari data tabel 1.1 di atas dapat dilihat jika partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu 2019 dapat dikategorikan tinggi, mendekati angka rata-rata partisipasi politik pemilih Kota Semarang.

Partisipasi politik dalam pemilu bersifat hirarki, memberikan hak suara di TPS dalam model hirarki partisipasi politik Rush dan Althoff berada pada urutan paling rendah yang hanya menuntut keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara sudah terlaksana ¹¹. Tingginya angka partisipasi politik berdasar pada jumlah yang memberikan hak suara di Pemilu 2019 sebagaimana data di atas

¹¹ Efriza. *Op.Cit.* Hlm 170-171

belum menjelaskan perbedaan derajat partisipasi politik dalam pemilu semasa Orde Baru yang juga tinggi dalam pemberian suara. Oleh sebab itu dalam penelitian ini partisipasi politik yang diteliti tidak sebatas pada memilih di TPS tetapi bentuk partisipasi dalam pemilu lainnya yang lebih membutuhkan sumber daya individu yang bersangkutan.

Menurut Ramlan Surbakti¹² tinggi atau rendahnya partisipasi politik seseorang disebabkan oleh, *pertama*, status sosial ekonomi (SSE) yang meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, bahwa mereka yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi lebih berpartisipasi. Faktor SSE sebagai faktor penting yang mempengaruhi partisipasi politik dikemukakan oleh banyak ahli politik, Arnstein misalnya, menemukan bahwa SSE yang rendah menyebabkan seseorang menjadi apatis. Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid dan Toto Pribadi menyebutkan partisipasi politik di negara-negara berkembang salah satunya sangat ditentukan oleh SSE¹³. Studi-studi partisipasi politik terbaru juga masih menunjukkan temuan yang sama bahwa SSE merupakan variabel penting yang mempengaruhi partisipasi politik¹⁴, studi terbaru tersebut fokusnya pada pemilih muda, yang secara umum bercirikan kelompok teralienasi dalam politik sebagaimana hal yang umum pada kelompok minoritas (dalam hal ini termasuk etnis Tionghoa di Indonesia). Faktor kedua menurut Ramlan Surbakti adalah faktor kesadaran politik, yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah seseorang paham informasi politik dan seberapa penting politik bagi mereka,

¹²Ramlan Surbakti. 2013. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

¹³ Efriza. Op.Cit. Hlm. 194

¹⁴ Mohammad Soud Alelaimat. 2019. Factors affecting political participation (Jordanian universities students' voting: field study 2017-2018). *Review of Economics and Political Science*. Emerald Publishing Limited. DOI10.1108/REPS-05-2019-0072; Saeed Ahmad. 2015. Role of Socioeconomic Status and Political Participation in Construction of Apathy Among Youth. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 00:1–9. DOI: 10.1080/10911359.2015.1021065

karena jika seseorang paham mengenai politik dan menganggap politik itu penting mereka akan ikut berpartisipasi dalam politik.

Faktor status sosial ekonomi diduga sebagai variabel yang berpengaruh pada tingkat partisipasi etnis Tionghoa, oleh karena secara umum etnis Tionghoa mapan secara ekonomi. Semasa Orde Baru kehidupan sosial politik mereka dibatasi, tidak boleh bekerja di bidang militer, keamanan, termasuk politik. Ruang yang disediakan hanya bidang ekonomi, yang kemudian menjadikan kelompok etnis Tionghoa memegang peranan vital dan penting dalam perekonomian¹⁵.

Faktor kesadaran politik, yang juga diduga berpengaruh karena pasca reformasi dalam kerangka demokrasi hak-hak politik etnis Tionghoa dikembalikan serta seiring adanya kemudahan akses informasi. Selanjutnya, berdasar pengalaman masa lalu, ada perlakuan diskriminatif kepada etnis Tionghoa, maka dalam konteks ini juga akan dilihat apakah partisipasi politik dalam Pemilu 2019 disadari sudah tidak merupakan ancaman bagi kehidupan etnis Tionghoa secara keseluruhan, dan sebaliknya dilihat sebagai sesuatu yang bermanfaat (yang bersifat relatif), dan untuk memenuhi kebutuhan material dan/atau immaterial bagi kehidupannya¹⁶.

¹⁵Yudono dkk, *Op.cit*

¹⁶ Morris Rosenberg menjelaskan bahwa orang menghindari aktivitas politik atau apatis manakala menganggap keterlibatannya akan mendatangkan risiko, aktivitas politik dipandang sebagai hal yang sia-sai, dan ketiadaan perangsang politik sebagai mahluk rasional. Berdasar hal ini Efriza membangun argumentasi mengapa orang berpartisipasi politik (Efriza . *Ibid*. Hlm.189-190)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu “Bagaimana pengaruh tingkat sosial ekonomi dan kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019?”, yakni:

1. Adakah pengaruh antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019?
2. Adakah pengaruh antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Ada-tidaknya pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019?
2. Ada-tidaknya pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam studi partisipasi politik, mengenai pengaruh tingkat sosial ekonomi dan kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi peneliti lain untuk penelitian lebih lanjut, dan bagi pembuat kebijakan sebagai informasi untuk penguatan pendidikan politik bagi etnis Tionghoa.

1.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, sebagai berikut:

1. Penelitian ini juga dilakukan di Kota Semarang oleh Patricia Sartika (2017) yang berjudul “Partisipasi Pemilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2015. Metode penelitian kualitatif. Temuannya, partisipasi pemilih etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas rendah dikarenakan ketidaktertarikan masyarakat dalam Pilwakot, kejenuhan masyarakat, kurangnya sosialisasi Pemilu. Kejenuhan terhadap Pemilu terjadi alasannya karena mereka merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah.¹⁷

¹⁷ Patricia Sartika. 2017. “Partisipasi Pemilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Tawang Mas dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

2. Penelitian oleh Triko Wijayanto (2020) dengan judul “Perilaku Memilih Masyarakat Tonghoa di Kelurahan Kranggan Pada Pilpres 2019” yang menyatakan bahwa Partispasi masyarakat Tionghoa di Kelurahan terbatas hanya dalam penggunaan suara saat hari H pemilihan Pilpres, tapi sangat rendah dalam kaitannya mengikuti tahapan kampanye, menjadi tim sukses Paslon, dan menjadi panitia pemilihan dalam Pilpres tahun 2019. Bentuk partisipasi responden di Kelurahan Kranggan dapat dikategorikan sebagai partisipasi gladiator dan partisipasi yang apatis. Perilaku memilih masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kranggan dalam Pilpres tahun 2019 lebih dipengaruhi oleh pendekatan psikologis dan pendekatan rasional atau *rational choice* dibandingkan pendekatan sosiologis. Faktor-faktor tersebut diantaranya disebabkan oleh *Party identity* terhadap PDI-P dan minat responden terhadap program-program peningkatan kesejahteraan yang telah dijalankan oleh Paslon Petahana berupa kartu perlindungan sosial, jaminan kesehatan, bantuan beras dan berbagai program peningkatan kesejahteraan yang lain.¹⁸
3. Penelitian oleh Ari Hervina (2016) dengan judul “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015”. Metode penelitian kualitatif. Temuannya, partisipasi masyarakat etnis Tionghoa masih tergolong rendah karena mereka hanya mengikuti pemberitaan perpolitikan daerah, dan minim

¹⁸ Triko Wijayanto. 2020. “Perilaku Memilih Etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam Pilpres Tahun 2019”. *Skripsi*. Ilmu Pemerintahan. FISIP. Universitas Diponegoro.

keikutsertaan sebagai petugas kampanye, anggota aktif, partai politik, LSM dan proyek-proyek sosial.¹⁹

4. Penelitian oleh Taufik Hidayat dengan judul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda”. Metode penelitian kuantitatif. Temuannya, faktor yang melatarbelakangi seseorang berpartisipasi adalah status sosial ekonomi dan kesadaran politik masyarakat, hipotesa diterima.²⁰
5. Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Irwansyah yang berjudul “Tingkat Ekonomi dan Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Pilkada Kota Medan”. Metode penelitian kuantitatif. Temuannya, etnis Tionghoa di Kelurahan Pusat Pasar mempunyai mata pencaharian sebagai pengusaha dan pedagang. Alasan ini dijadikan sebagai penyebab dari banyaknya etnis Tionghoa yang tidak terlibat langsung di dalam kegiatan kampanye tersebut.²¹

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka kajian tentang partisipasi masyarakat Tionghoa sudah dilakukan, termasuk di Kota Semarang oleh Patricia Sartika (2017), namun penelitiannya di wilayah yang berbeda dan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian Patricia Sartika di Tawang Mas, merupakan

¹⁹ Ari Hervina. 2016. “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015”. *Skripsi*. Universitas Lampung.

²⁰ Taufik Hidayat. 2016. “Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Legislatif (PILEG) Tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 4(4): 562-576. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2017/01/Pin_Taufik_Partisipasi%20Politik%20\(01-09-17-02-42-07\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2017/01/Pin_Taufik_Partisipasi%20Politik%20(01-09-17-02-42-07).pdf). Diakses pada 19 Oktober 2019 pukul 20.45 WIB.

²¹ Bobby Irwansyah. 2010. “Tingkat Ekonomi dan Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Pilkada Kota Medan”. *Jurnal POLITEIA*, 2(2): 88-97. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/article/download/16116/6967>. Diakses pada 19 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

kawasan hunian baru, didirikan sekitar 1980-an, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kranggan di kawasan Pecinan, hunian yang sudah terbangun sejak jaman Hindia Belanda.

Penelitian pada lokasi yang sama, yaitu Kelurahan Kranggan Kota Semarang oleh Triko Wijayanto, studinya menggunakan pendekatan perilaku memilih dan fokus pada Pilpres 2019. Hal berbeda, penelitian ini bukan studi perilaku memilih, peneliti menggunakan variabel berbeda, yakni menguji status sosial ekonomi dan kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam Pemilu 2019, tidak memisahkan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Adapun penelitian yang memiliki kemiripan, yakni menggunakan metode kuantitatif dan menguji hipotesa menggunakan variabel yang sama adalah yang dilakukan oleh Taufik Hidayat namun pada lokasi yang berbeda. Dari penjelasan ini dapat ditunjukkan ada kebaruan dari penelitian ini, yakni menguji hipotesa status sosial ekonomi dan kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilu 2019 yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Partisipasi Politik dalam Pemilu

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Partisipasi politik menurut Herbert McClosky adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sebagai pembanding Norman H. Nie dan Sidney Verba mengemukakan partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit

banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil mereka.²²

Kedua definisi tersebut memiliki persamaan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas masyarakat untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil pemerintah, termasuk dalam seleksi pemimpin atau pemilihan umum yang diasumsikan kegiatan tersebut didorong oleh keyakinannya bahwa melalui aktivitas tersebut kepentingannya tersalur atau setidaknya memperoleh perhatian atau punya efek (*political efficacy*), sehingga aktivitas partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik²³. Cara pandang ini lazimnya ditemukan pada negara dengan demokrasi yang sudah mapan, sehingga dalam konteks ini McClosky, Nie dan Verba, serta Gabriel A. Almond menggolongkan partisipasi politik sebagai aktivitas politik bersifat sukarela atau otonom²⁴. Pandangan ini tidak mampu menampung fenomena di negara berkembang, sebagaimana temuan Huntington dan Nelson bahwa partisipasi di negara komunis dan negara berkembang cenderung tidak otonom, melainkan mobilisasi oleh kekuatan luar individu yang bersangkutan (oleh pemerintah atau partai yang berkuasa), baik berupa persuasi atau tekanan, dan juga sulit membedakan antara keduanya, apakah otonom ataukah mobilisasi²⁵.

Partisipasi politik yang dilakukan pada masa pemilu untuk memilih pemimpin yang mengisi jabatan publik, dan yang di luar masa pemilu untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik hasil pemilu. Atas dasar itu ada ragam bentuk partisipasi politik. Miriam Budiardjo mengidentifikasi

²² Toto Pribadi. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Hlm. 33.

²³ Efriza. *Op.Cit.* Hlm. 164

²⁴ Efriza. *Ibid.* Hlm. 165

²⁵ *Ibid.* Hlm. 164-166.

kegiatan partisipasi politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.²⁶ Dedi Irawan menggolongkan atas *voting* (pemberian suara), kampanye politik, aktivitas group (digerakkan oleh kelompok secara sistematis, seperti demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, perang, gerilya, teror dan intimidasi, diskusi politik dll), dan kontak politik (lobi politik kepada pimpinan parpol atau elit politik, dll)²⁷.

Berdasar saluran politik, Gabriel A. Almond membagi partisipasi politik dua sifat kegiatan yaitu: ²⁸

1. Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern seperti pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.
2. Partisipasi politik non-konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang Gerilya dan revolusi.

²⁶ Miriam Budiardjo. *Op.Cit.* Hlm. 367.

²⁷ Efriza. *Op.Cit.* Hlm. 178

²⁸ *Ibid.* 290

Berdasar pada bentuk-bentuk partisipasi yang ada, Deddi Irawan membuat pengelompokan sifat partisipasi politik atas lima bentuk, yakni: legal atau sesuai prosedur dan yang ilegal, konvensional (lunak) dan non konvensional (kekerasan), otonom dan mobilisasi, mendukung dan menolak, langsung dan tak langsung²⁹.

Penelitian ini mengenai partisipasi dalam Pemilu 2019, berdasar pada teori yang sudah dijelaskan, maka yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam Pemilu adalah aktivitas pemilih dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang menjadi ruang pemilih dan bersifat konvensional.

Tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri atas 10 tahapan penyelenggaraan Pemilu, yaitu:

1. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
5. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. masa kampanye Pemilu;
7. masa tenang;
8. pemungutan dan penghitungan suara;
9. penetapan hasil Pemilu; dan

²⁹Efriza. *Ibid.* Hlm.168

10. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota³⁰

Dari sepuluh tahapan tersebut tidak semuanya menyertakan keterlibatan pemilih. Menurut Ramlan Surbakti ada beragam partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yang tidak sebatas hanya memberikan suara pada hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu menurutnya luas, meliputi aktivitas-aktivitas berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi pemilu
2. Melaksanakan pendidikan pemilih
3. Memilih calon atau pasangan calon dalam partai politik (pemilu pendahuluan)
4. Membahas rencana visi, misi dan program partai dalam pemilu
5. Memberikan suara sebagai pemilih (voting)
6. Menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu
7. Mendukung peserta pemilu/calon tertentu
8. Mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu.
9. Menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu, dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu.
10. Melakukan survey dan menyebar-luaskan hasil survey tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu/calon.
11. Melaksanakan dan menyebar-luaskan hasil perhitungan cepat pemilu (*quick count*)³¹

³⁰ Ramlan Surbakti dkk. 2015. *Naskah Akademik & Draft RUU Kitab Hukum Pemilu*. Jakarta: Kemitraan. Hlm. 40

Tidak semua bentuk partisipasi politik ini menjadi ruang sepenuhnya masyarakat, ada yang masyarakat harus bekerjasama dengan KPU sebagai penyelenggara. Misalnya sosialisasi adalah kewenangan KPU, keterlibatan masyarakat adalah bekerjasama membantu KPU dalam sosialisasi. Kemudian partisipasi memilih calon yang akan diusulkan dan visi misi yang akan diajukan adalah ruang partai politik, sehingga terbatas hanya anggota atau bahkan pengurus saja yang bisa terlibat. Adapun yang dimaksud masyarakat tidak identik dengan pemilih, melainkan pemilih adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat meliputi:

1. individu warga negara
2. kelompok atau forum
3. organisasi kemasyarakatan
4. partai politik
5. media massa (cetak maupun elektronik)
6. LSM & organisasi masyarakat sipil lainnya³².

Partisipasi politik juga membentuk piramida, yang pada bagian dasar melebar tetapi menyempit semakin ke puncak seiring dengan meningkatnya intensitas aktivitas politik. Miriam Budiardjo menggunakan piramida politik Roth dan Wilson, menjelaskan di antara basis dan puncak piramida terdapat berbagai macam kegiatan politik yang berbeda-beda intensitasnya maupun bobot komitmennya, dan karenanya membutuhkan sumber daya yang berbeda, makin ke puncak makin besar sumber daya yang diperlukan dan semakin dapat diakses oleh sedikit orang. David F. Roth dan Frank L. Wilson menyusun piramida partisipasi

³¹ Ramlan Surbakti & Didik Supriyanto. 2011. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 12: Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan. Hlm. 12-13

³² Ramlan Surbakti & Didik Supriyanto. Ibid. Hlm. 5

dari dasar (basis) ke puncak atas orang apolitis, pengamat, partisipan, dan aktivis³³. Piramida ini tidak khusus menggambarkan partisipasi dalam pemilu. Hal yang sama pada piramida Lester Milbarth dan ML. Goel, ia mengajukan tiga tipe partisipasi politik yang membentuk piramida, dari dasar ke puncak, atas tipe penontob, tipe transisional, dan tipe gladiator³⁴. Pada kedua model piramida tersebut aktivitas pemberian suara (voting) berada pada posisi dasar.

Model piramida atau yang menunjuk pada hirarki partisipasi politik dalam pemilu lebih dapat diwakili oleh model Michael Rush dan Phillip Althoff yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilu 2019. Rush dan Althoff menyatakan terdapat sembilan tingkatan dalam tindakan partisipasi politik yang dilakukan seseorang. Tingkatan ini untuk menunjukkan tinggi atau rendahnya partisipasi politik seseorang.³⁵

1. *Voting* (pemberian suara dalam pemilu). Merupakan tingkat partisipasi paling rendah, karena hanya dilakukan secara periodik, tidak rutin.
2. Keikutsertaan dalam suatu diskusi politik.
3. Keikutsertaan dalam kampanye politik, rapat umum, demonstrasi, dsb.
4. Tercatat sebagai anggota biasa dalam suatu organisasi masyarakat (ormas) yang bernuansa politik.
5. Tercatat sebagai pengurus aktif dalam suatu ormas.
6. Menjadi anggota biasa dalam sebuah partai politik (parpol).
7. Menjadi pengurus aktif dalam sebuah parpol.

³³ Efriza. *Op.Cit.* Hlm. 168-169

³⁴ Efriza. *Ibid.* Hlm.175. Lihat juga Ahmad Faizin Karimi. 2012. *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Gresik: MUHI Press. Hlm. 39.

³⁵ Miriam Budiardjo. *Op.Cit.* Hlm. 322

8. Secara profesional bekerja sebagai pencari jabatan politik atau jabatan administratif.
9. Secara profesional menduduki jabatan politik di pemerintahan atau jabatan administratif. Ini adalah tingkatan partisipasi yang tinggi.

1.6.2 Tingkat Sosial Ekonomi

Tinggi atau rendahnya partisipasi politik seseorang menurut Ramlan Surbakti dipengaruhi faktor status sosial dan ekonomi. Yang dimaksud status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.³⁶

Surbakti menyatakan:

seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya. Status sosial ekonomi menurut Mayer Soekanto

³⁶ Yoyoh Rohaniah dan Efriza. 2017. *Sistem Politik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing. Hlm. 319.

³⁷ Yoyoh Rohaniah dan Efriza. *Ibid.* Hlm. 90.

berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi.

Sedangkan Thamrin Nasution mengatakan:

Status sosial ekonomi adalah suatu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh sehingga mempunyai peranan pada status sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Penghasilan atau pekerjaan tertentu juga dapat menentukan tinggi rendahnya status seseorang.³⁸

Menurut M. Arifin Noor kelas sosial terbagi dalam tiga golongan yaitu:

1. Kelas Atas (*Upper Class*) : Berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan sebagainya.
2. Kelas Menengah (*Middle Class*) : Kelas ini diidentikkan oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil. Biasanya ditempati oleh orang-orang yang kebanyakan berada pada tingkat yang sedang-sedang saja.
3. Kelas Bawah (*Lower Class*) : Menurut Mulyanto Sumardi kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.³⁹

Pendapatan seseorang terkait dengan profesi atau pekerjaan yang menjadi sumber pendapatannya. Menurut Mulyasa, profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Sebuah profesi memerlukan pembelajaran atau pelatihan keterampilan dalam periode waktu yang lama. Suatu ikatan profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang

³⁸ Thamrin Nasution dan Muhammad Nur. 1986. *Deferensiasi Sosial*. Jakarta: Bina Aksara.

³⁹ H. M. Arifin Noor. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV Pustaka Setia.

profesi tersebut.⁴⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) yang bersifat spesifik dan tertentu. Menurut deifinisi Kamus Besar Bahasa Indonesia Profesional adalah sebagai berikut : (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.⁴¹

Salah satu komponen status sosial ekonomi adalah pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses bagi suatu bangsa atau negeri untuk mempersiapkan generasi penerusnya yaitu generasi yaang masih muda untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien serta dapat memecahkan berbagai probelamitika yang berkembang seiring kemajuan dan tantangan zaman modern. Pengertian pendidikan jauh lebih luas dan lebar jika dibandingkan dengan sebuah definisi tentang pengajaran, karena secara fakta sebuah proses pendidikan adalah suatu proses diamana suatu bangsa atau negara membina warga negaranya untuk mengembangkan kesadaran diri warga negara, dengan kesadaran tersebut sebuah bangsa dapat mewariskan nilai, ilmu serta kebudayaan yang bermanfaat bagi generasi seterusnya.

Menurut M.J Langeveld mengatakan bahwa “Sebuah Proses pendidikan adalah proses yang memeberikan bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih membutuhkan proses dan fasailitas pendidikan.”⁴² Pengertian Pendidikan Menurut K.H Dewantara “Pendidikan adalah sebuah proses untuk memajukan sebuah budi

⁴⁰ E. Mulyasa. 2006. *Menjadi Guru Professioanl Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset. Hal 87

⁴¹ Kamus Besar BahasaI Indonesia

⁴² Sutari Imam Barnadib. 1999. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit FIP IKIP hal.5

pekerta (rohani), pikiran (intelektual) dan jasmani anak”. Definisi tentang pengertian pendidikan juga dijelaskan oleh Umitro bahwa “Sebuah proses pendidikan adalah pemanfaatan potensi-potensi, kapasitas-kekapasitas, dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan media yang disusun sedemikian rupa dengan baik, dalam mencapai tujuan-tujuan baik dari sebuah proses pendidikan”⁴³. Menurut beberapa pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu proses bimbingan dan pengajaran dari satu manusia ke manusia lain dengan metode tertentu dan dalam waktu yang relatif lama.

1.6.3 Kesadaran Politik

Ramlan Surbakti menyebutkan faktor kesadaran politik berpengaruh terhadap partisipasi politik seseorang. Menurutnya, apabila seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik seseorang rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).⁴⁴

Menurut Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, yakni: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).⁴⁵ Yang dimaksud sikap dan pola perilaku disini adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah,

⁴³ Madyo EkoSusilo dan R.B Kasihadi. 1990. *Dasar-dasar Pendidikan*. Semarang : Efhar Publishing hal. 1

⁴⁴ Ramlan Surbakti. *Loc. Cit.*

⁴⁵ Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.

apakah seseorang menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.⁴⁶

Jeffrey M. Paige menyebutkan, kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.⁴⁷ Kesadaran politik merupakan berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik.⁴⁸

Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁹ Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai. Dari beberapa pengertian kesadaran politik dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya.

1.6.4 Etnis Tionghoa

Em Zul Fajri menjelaskan jika etnis berkenaan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Koentjaraningrat mengemukakan

⁴⁶ Ramlan Surbakti. *Op. Cit.* Hlm. 144.

⁴⁷ Ramlan Surbakti. *Ibid.*

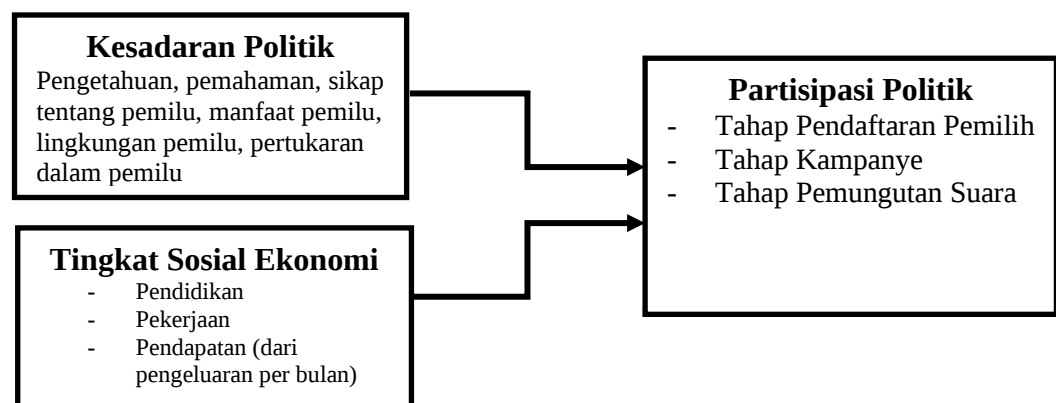
⁴⁸ Utsman Abdul Muis Ruslan. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia

⁴⁹ Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

jika konsep yang tercakup dalam istilah etnis adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga.⁵⁰

Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis yang ada di Indonesia, generasi pertamanya berasal dari pelabuhan Xiamen Provinsi Fujian berlayar menuju Singapura dan Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, yang pada kenyataannya mereka mengalami perjuangan yang keras dan beberapa penderitaan, selang beberapa tahun kemudian berhasil melakukan pembangunan dan perubahan di antaranya menjadi pengusaha dan bankir ternama.⁵¹

1.6.5 Model Hubungan Antar Variabel



Penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel bebas meliputi (X_1) dan (X_2), yang kedua adalah variabel terikat (Y).

1. Variabel bebas (X). Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat sosial ekonomi (X_1) dan kesadaran politik (X_2).

⁵⁰ Marina Syva Pratiwi. 2017. "Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017". *Skripsi*. Hlm. 31. <http://digilib.unila.ac.id/26947/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada 26 Oktober 2019 pukul 16.35 WIB.

⁵¹ Bobby Irwansyah. *Loc. Cit.*

2. Variabel terikat (Y). Variabel yang dipengaruhi oleh variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah partisipasi politik.

1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Ada pengaruh yang signifikan tingkat sosial ekonomi dan kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat etnis tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2019.

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan tingkat sosial ekonomi dan kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat etnis tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2019.

1.8 Definisi Konsep

1.8.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam Pemilu adalah aktivitas pemilih dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang menjadi ruang pemilih dan bersifat konvensional, berupa kegiatan memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, diantaranya menjadi partisipan dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum, ikut kampanye, serta menjadi anggota aktif dan pasif suatu organisasi politik.

1.8.2 Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya. Status sosial ekonomi dalam penelitian ini dilihat dari pendidikan, pekerjaan dan pendapatan (dari pengeluaran per bulan).

1.8.3 Kesadaran Politik

Kesadaran politik ialah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Kesadaran politik dalam penelitian ini dilihat dari pengetahuan informasi dan pentingnya pemilu, pemahaman pentingnya partisipasi politik dalam pemilu, sikap dalam proses pelaksanaan pemilu. Termasuk kesadaran politik mereka terhadap lingkungan politik yang aman, serta manfaat dan pertukaran yang diperoleh dalam pemilu.

1.9 Definisi Operasional

Menurut Rahmat operasionalisasi konsep adalah konsep abstrak yang menjadi konsep yang dapat diamati dan diukur. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar peneliti adalah operasionalisasi konsep yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur.⁵²

Adapun pengukuran masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁵² Muhammad Iksan. 2014. "Pengaruh Perilaku Pemilih terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam Putaran Kedua". *Skripsi*. Universitas Bengkulu. Hlm. 35. <http://repository.unib.ac.id/9214/1/I%20CII%20CIII%20CI-14-muh-FS.pdf>. Diakses pada 27 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB.

Tabel 1.2
Variabel dan indikator

Variabel Penelitian	Indikator
(X₁) Tingkat Sosial Ekonomi	- Pendidikan menurut BPS meliputi tidak pernah sekolah/belum tamat SD, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi.⁵³ - Pekerjaan berdasarkan data monografi Kelurahan Kranggan Kota Semarang 2019 meliputi pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, Pegawai Negeri + ABRI, pensiunan, lain-lain (jasa). - Pendapatan (diukur dari jumlah pengeluaran per bulan)
(X₂) Kesadaran Politik	Pengetahuan, pemahaman, sikap tentang pemilu, manfaat pemilu, lingkungan pemilu, pertukaran dalam pemilu
(Y) Partisipasi Politik	Partisipasi politik sesuai dengan tahapan Pemilu: 1. Tahap pendaftaran pemilih 2. Tahap kampanye 3. Tahap pemungutan suara

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dua variabel sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif tipe eksplanatori, artinya penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

⁵³<https://www.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html>. Diakses pada 27 November 2019 pukul 10.35 WIB.

Menurut Mardalis penelitian eksplanatori tidak hanya sekedar memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian yang ingin dijelaskan, tetapi juga bagaimana hubungannya dengan gejala sosial yang ada, dan mengapa hubungannya seperti itu. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesis yang menguji hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti.⁵⁴ Selain itu terdapat pendapat lain menurut Prasetyo mengenai penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, kemudian data yang diperoleh diolah dan disusun sampai diperoleh kejelasan tentang hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Tujuan utama dalam penggunaan metode ini adalah untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatif dikarenakan peneliti ingin menguji hubungan sebab status sosial ekonomi dan kesadaran politik masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan Kota Semarang yang akan memberikan sebuah akibat terhadap partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2019.

⁵⁴ Maya Yuliantina. "Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan". *Skripsi*. Hlm. 48. <http://digilib.unila.ac.id/23828/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

Diakses pada 27 Januari 2020 pukul 15.37 WIB.

⁵⁵ Guntur Ardyan Tamara. "Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015". *Skripsi*. Hlm.41-42. <http://digilib.unila.ac.id/24550/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

Diakses pada 27 Januari 2020 pukul 15.43 WIB.

1.10.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kranggan Kota Semarang yang penduduknya didominasi etnis Tionghoa.

1.10.3 Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁵⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat etnis Tionghoa dewasa 17 tahun keatas di Kelurahan Kranggan Kota Semarang dengan jumlah 3.347 orang dengan pembagian laki-laki 1.618 orang dan 1.729 orang perempuan.

1.10.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling dengan spesifikasi *cluster random sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel⁵⁷. Sedangkan *cluster sampling* adalah cara atau teknik pengambilan sampel secara random dalam bentuk kelompok bukan individu⁵⁸. Cluster sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Penetapan cluster sampling dalam penelitian ini adalah pada perbandingan prosesntasi pada wilayah yang lebih kecil, yaitu pada tingkat Rukun Warga (RW).

⁵⁶ Ismail Nurdin, Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. Hlm. 91.

⁵⁷Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 120

⁵⁸Sudjarwo, dkk. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 273

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Slovin, yaitu:⁵⁹

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n: banyaknya sampel

N: Jumlah populasi

d: Tarif nyata (0,10)

Maka dengan menggunakan rumus tersebut banyaknya sampel adalah:

$$n = \frac{3347}{3347 (0,10)^2} = 97,09 \text{ dibulatkan menjadi } 97 \text{ orang}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa responden yang akan diteliti adalah sebanyak 97 orang pada masyarakat etnis Tionghoa Kelurahan Kranggan Kota Semarang.

1.10.5 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan data-data yang diperoleh berdasarkan sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan Kota Semarang.

⁵⁹ Fajri Ismail. 2018. *Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 47.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau tidak langsung. Data sekunder ini dipergunakan sebagai pendukung. Sumber data ini berasal dari dokumentasi, undang-undang, buku-buku, koran, jurnal, majalah, arsip-arsip, dan informasi lainnya yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data berupa arsip kependudukan masyarakat etnis Tionghoa dan arsip monografi Kelurahan Kranggan Kota Semarang.

1.10.6 Skala Pengukuran

Data diperoleh dengan berdasarkan skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial⁶⁰. Skala Likert menggunakan lima tingkatan skor yang terdiri dari:

Tabel 1.3

Skala likert

Pertanyaan Positif		Pertanyaan Negatif	
Jawaban Responden	Skor/Bobot Nilai	Jawaban Responden	Skor/Bobot Nilai
Sangat setuju (sangat tinggi)	5	Sangat setuju (sangat tinggi)	1
Setuju (tinggi)	4	Setuju (tinggi)	2
Kurang setuju (sedang)	3	Kurang setuju (sedang)	3
Tidak setuju (rendah)	2	Tidak setuju (rendah)	4
Sangat tidak setuju (sangat rendah)	1	Sangat tidak setuju (sangat rendah)	5

Dengan skala likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap

⁶⁰ Sugiyono, Op.Cit, Hlm.92

serangkaian pertanyaan yang merupakan indikator dari variabel indeks X dan Y. Dalam penelitian ini skala likert dipergunakan disemua pernyataan baik pertanyaan positif maupun pertanyaan negatif.

Langkah langkah yang dilakukan peneliti untuk mengukur variabel indeks X dan Y sebagai berikut:

1. Menyusun variabel indeks X atau Variabel indeks Y dari indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan
2. Terhadap variabel indeks X maupun variabel indeks Y dilakukan analisis interval menggunakan skala likert dengan mengalikan frekuensi jawaban responden per kategori dengan skor/bobot nilainya sesuai tabel dummy berikut:

Tabel 1.4

Analisis Interval

No.	Kategori Responden	Frekuensi	Skor	Total Skor
1	Sangat rendah		1	
2	Rendah		2	
3	Sedang		3	
4	Tinggi		4	
5	Sangat Tinggi		5	
	Total			

3. Menghitung besaran indeks (%) berdasar total skor/bobot nilai variabel indeksnya, yakni:

- Menentukan skor Maksimum = $100 \times 5 = 500$ (jumlah responden x skor tertinggi likert)

- Menentukan Skor Minimum = $100 \times 1 = 100$ (jumlah responden x skor terendah likert)
- Menghitung besaran Indeks (%) = $(\text{Total Skor} / \text{Skor Maksimum}) \times 100$

4. Mencocokkan besaran indeks (%) berdasar interval penilaian

Tabel 1.5

Interval penilaian

No.	Kategori	Interval penilaian
1	Sangat rendah	0% – 19,99%
2	Rendah	20% – 39,99%
3	Sedang	40%-59,99%
4	Tinggi	60%-79,99%
5	Sangat Tinggi	80% -100%

5. Membuat kesimpulan kategori variabel indeks tersebut.

1.10.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket atau Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk dijawab oleh responden terpilih dan merupakan suatu mekanisme pengumpul data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian⁶¹. Kuesioner ini kemudian disebarkan kepada responden yaitu masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Kranggan Kota Semarang untuk diisi atau dijawab kemudian setiap

⁶¹ Iqbal Hasan. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara., hlm. 19.

pertanyaan disediakan alternatif jawaban berjenjang dan setiap jenjang pertanyaan diberi skor yang tidak sama pada setiap jenjang jawabannya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, artikel, guntingan koran, dan referensi lainnya. Dengan metode ini peneliti berupaya menggabungkan berbagai macam informasi yang didapat.

1.10.8 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan tipe penjelasan (*eksplanatory research*). Dengan teknik atau metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel Probability Sampling. Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan program komputer *Statistick Package For Social Sience* 21 atau SPSS 21 Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan Analisis regresi sederhana (*simple linier regression*) digunakan untuk mengukur besaran pengaruh suatu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y, maka uji regresi sederhana menggunakan SPSS maka persamaan regresi linear sederhana dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila X = 0)

b = Koefisien regresi